



PEMERINTAH KOTA MALANG

DOKUMEN RENJA

Tahun 2024

**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**



KOTA MALANG

RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang.

Renja Tahun 2024 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Malang dan merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk menyelaraskan dan mensinkronkan tujuan serta sasaran program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2024 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 disusun sesuai dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB.II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 merupakan Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker, PMPTSP) sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk mengevaluasi renja tahun lalu (n-2) tahun 2022 dilaksanakan sampai akhir triwulan 4 tahun 2022. Evaluasi hasil pengukuran kinerja untuk Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap 9 program (meliputi 8 program pembangunan dan 1 program rutin) dan 20 kegiatan (meliputi 12 kegiatan pembangunan dan 8 kegiatan rutin) serta 37 sub kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penetapan Kinerja Tahun 2022 secara umum menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terkait pelaksanaan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan 4 (empat) Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja keluaran pada renja yang direncanakan adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi sebesar 28 jenis dari target di renja sebanyak 35 jenis sehingga baru tercapai 88%.
- b. Program Hubungan Industrial.
 - 1) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terealisasi sebesar 50% dari target pada renja 67% sehingga baru tercapai 74,63%, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 74 orang dari 80 orang sehingga capaian sebesar 92,50%.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 1) Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal terealisasi 470 berkas dari target di renja sebesar 1100 berkas sehingga baru tercapai 42,73%.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini terealisasi 100% dari target pada renja sebesar 100%, dengan rincian sub kegiatan yang telah terealisasi 100% sesuai rencana adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terealisasi 2 dokumen dari target pada renja sebesar 2 dokumen.
- b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terealisasi 10 dokumen dari target pada renja sebesar 10 dokumen
- c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 1 sertifikasi, 2 dokumen SKM dan 2 dokumen standar pelayanan dari target pada renja sebesar 1 sertifikasi, 2 dokumen SKM dan 2 dokumen standar pelayanan.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar 66 orang dari target pada renja sebesar 66 orang.
- b) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD terealisasi 5 laporan dari target pada renja 5 laporan.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini sudah terealisasi 80% dari target renja 80%, sub kegiatan yang tercapai adalah:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi 5 jenis komponen dari target pada renja sebanyak 5 jenis komponen.
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar 34 jenis dari target pada renja sebesar 34 jenis.
- c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terealisasi sebesar 11 jenis dari target pada renja sebesar 11 jenis.
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 720 eksemplar dan 2 dokumen dari target pada renja sebesar 720 eksemplar bahan bacaan dan 2 dokumen perundang-undangan.
- e) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD terealisasi sebesar 750 berkas dari target pada renja sebesar 750 berkas.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini sudah terealisasi 100% dari target renja 100%, dengan rincian sub kegiatan yang sudah tercapai 100% adalah:

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi sebesar 12 bulan dari target pada renja sebesar 12 bulan.

- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi 750 m2, 5600 m2 dan 17 jenis komponen dari target pada renja sebanyak 750 m2, 5600 m2 dan 17 jenis komponen.
 - 5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan yang telah mencapai 100% adalah :
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD terealisasi 2 laporan dari target pada renja sebesar 2 laporan
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, rincian sub kegiatan yang mencapai 100% sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terealisasi 41 unit dari target di renja sebanyak 41 unit dan BBM terealisasi sebesar 20.160 liter dari target di renja sebesar 20.160 liter.
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terealisasi baru 1 paket untuk rehabilitasi MPP dari target di renja sebanyak 1 paket.
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terealisasi 5 jenis dari target di renja sebanyak 5 jenis.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
Kegiatan ini terealisasi sebesar 415 orang dari target pada renja 415 orang, sehingga tercapai 100% sebagaimana terinci dibawah ini :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi terealisasi 136 dan 279 orang dari target di renja sebesar 136 dan 279 orang sehingga tercapai 100%.
 - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Kegiatan ini terealisasi sebesar 35 LPKS orang dari target pada renja 35 LKS, sehingga tercapai 100% sebagaimana terinci dibawah ini :
 - a) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta terealisasi 35 LPKS dari target di renja sebesar 35 LPKS sehingga tercapai 100%.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja.
- 1) Pelayanan Antar Kerja di daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sub kegiatan adalah :
 - a) Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja terealisasi sebesar 80 orang dari target pada renja sebesar 80 orang.
 - 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan rincian sub kegiatan adalah :
 - a) Job Fair/Bursa Kerja terealisasi sebesar 35 perusahaan dari target pada renja sebesar 35 perusahaan.
 - 3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota, dengan rincian sub kegiatan adalah :
 - a) Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ pekerja migran Indonesia (PMI) terealisasi sebesar 34 orang dari target pada renja sebesar 34 orang.
- d. Program Hubungan Industrial.

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan terealisasi sebesar 80 orang dari target pada renja sebesar 80 orang.
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota, dengan subkegiatan :
 - a) Pelaksanaan operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit daerah kabupaten/kota terealisasi sebesar 2 dokumen dari target pada renja sebesar 2 dokumen.
- e. Program Promosi Penanaman Modal.
- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini masih terealisasi sebesar 1 kali dari target pada renja 1 kali promosi, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 1 kali pameran investasi, 20 pelaku usaha yang terfasilitasi dan 1 dokumen profil investasi dari target pada renja sebesar 1 kali pameran investasi, 20 pelaku usaha yang terfasilitasi dan 1 dokumen profil investasi.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Adapun program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran pada renja yang direncanakan adalah :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Terdapat sub kegiatan yang tercapai melebihi rencana, yaitu :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, terealisasi sebesar 66 orang dari target pada renja sebesar 65 orang sehingga capaian sebesar 101,57%.
 - 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdapat sub kegiatan yang tercapai melebihi rencana, yaitu :
 - a) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar 5540 kotak makanan minuman dan 50 kali perjalanan dinas dari target pada renja sebesar 5183 kotak makanan minuman dan 47 kali perjalanan dinas sehingga capaian penyediaan makanan minuman sebesar 106,89% dan jumlah perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi keluar daerah tercapai sebesar 106,38%.
 - b. Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
Kegiatan ini terealisasi sebesar sebanyak 13.290 izin terbit dari target pada renja sebanyak 10.000 izin.
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- teralisasi sebesar 6581 izin bidang Pekerjaan Umum dan 6709 izin Bidang Pariwisata, Sosial, Ekonomi dan Budaya dari target pada renja sebesar 5000 izin Pekerjaan Umum dan 5000 izin Bidang Pariwisata, Sosial, Ekonomi dan Budaya sehingga tercapai 131,62% dan 134,18%.
- b) Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan teralisasi sebesar 64 pengaduan yang ditangani dari target pada renja sebesar 50 pengaduan yang ditangani sehingga tercapai sebesar 128%.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 1) Kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota terealisasi sebesar 142 perusahaan dari target pada renja sebesar 23 perusahaan yang mendapat pengawasan pelaksanaan penanaman modal sehingga tercapai 617,39%.
 - a) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal teralisasi sebesar 300 orang dari target pada renja sebesar 245 orang peserta pembinaan sehingga tercapai sebesar 122,45%.
 - b) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal teralisasi sebesar 9 kali dari target pada renja sebesar 12 kali pengawasan penanaman modal sehingga tercapai sebesar 133,33%.
- d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- 2) Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.
 - a) Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik teralisasi sebesar 11.726 data dari target pada renja sebesar 8000 data sehingga tercapai sebesar 146,58%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- a. Masukan tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 01) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Tidak tercapainya target Sub Kegiatan ini disebabkan karena BMD yang ditetapkan dalam RKBMD sebanyak 28 jenis sehingga pengadaan sarana dan prasarana dinas dan MPP disesuaikan dengan RKBMD.
 - 2) Program Hubungan Industrial
 - a) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - 01) Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan

yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diatas disebabkan karena beberapa perusahaan yang diundang tidak menghadiri kegiatan tanpa memberikan konfirmasi sebelumnya sehingga tidak dapat mengganti dengan perusahaan yang lain.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal.

a) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara TERpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

01) Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Tidak tercapainya target Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal diatas disebabkan karena perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG/IMB) proses pelayanannya termasuk peninjauan lapangan atas permohonan izin tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah lain.

b. Masukan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

01) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diatas disebabkan karena penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal ditetapkan.

02) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat tercapai karena penyusunan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

03) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diatas disebabkan karena penyusunan SOP telah dilaksanakan diawal tahun, penyusunan dokumen SKM terlaksana sesuai jadwal dan terpenuhinya Sertifikasi ISO 9001:2015 tepat waktu.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

01) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diatas disebabkan karena terpenuhinya pembayaran gaji sesuai jumlah ASN.

02) Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dapat tercapai karena adanya penyusunan laporan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

01) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya

anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.

- 02) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 03) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 04) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 05) Sub kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 01) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 02) Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - e) Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - 01) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 01) Sub kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 02) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - 03) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- a) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

- 01) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
- b) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 01) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - a) Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di daerah kabupaten/kota.
 - 01) Sub kegiatan Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dapat tercapai karena tingginya antusiasme peserta dari BKK dalam mengikuti kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan sebagai bekal memasuki dunia kerja.
 - b) Kegiatan informasi pasar kerja.
 - 01) Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - c) Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota.
 - 01) Sub kegiatan Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
- 4) Program Hubungan Industrial
 - a) Kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
 - 01) Sub kegiatan Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
 - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
 - 01) Sub kegiatan Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah kabupaten/kota dapat tercapai karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu dalam hal pelaksanaan rapat rutin LKS Tripartit dan pembahasan usulan rekomendasi UMK Kota tahun 2023.
- 5) Program Promosi Penanaman Modal.
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota baru diatas disebabkan karena terpenuhinya sumber daya anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan dan dilaksanakan tepat waktu.
- c. Masukan penjelasan atas pencapaian yang melebihi target
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 01) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi diatas disebabkan karena tersedianya anggaran untuk sejumlah 65 orang
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 01) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dapat tercapainya target Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota diatas disebabkan karena banyaknya undangan dan rapat koordinasi baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi..
 - 2) Program Pelayanan Penanaman Modal.
 - a) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - 01) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, karena banyaknya permohonan izin yang masuk dan telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan sehingga realisasi melebihi target yang ada di renja.
 - 3) Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - a) Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanama modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - 01) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dapat terealisasi melebihi target karena pelaksanaan kegiatan melebihi target yang ditetapkan dalam Juknis DAK mengingat ketersediaan anggaran yang dapat mengampu lebih banyak peserta.
 - 02) Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat tercapai melebihi target karena urgensi kebutuhan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sehingga pelaksanaan melebihi target yang ditetapkan.
 4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
 - a) Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

01) Sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dapat tercapai melebihi target karena kebutuhan data yang selalu dinamis sehingga pengolahan dilaksanakan sesuai kebutuhan tersebut.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Secara umum untuk program ini didukung oleh anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan PAD yang mendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan kerja sesuai kompetensi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut para pencari kerja mendapat bekal untuk bekerja secara mandiri atau ditempatkan pada perusahaan sesuai dengan kompetensinya.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini menunjang pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk penanganan pengangguran melalui kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja (job fair dan penyampaian informasi pasar kerja) serta perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

c. Program Hubungan Industrial.

Program ini menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja, optimalisasi Lembaga Kerjasama Tripartit dan pembahasan usulan UMK.

d. Program Promosi Penanaman Modal

Untuk Program tersebut menunjang sasaran pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai salah satu kegiatan untuk menarik investor yang dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Malang. Diharapkan di triwulan 4 (empat) dapat tercapai semua target indikator seperti pameran promosi investasi dan fasilitasi untuk pelaku usaha dalam menarik investor.

e. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Belum Optimalnya program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ini dikarenakan semua Kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu masih dalam proses pembahasan di Dewan. Sehingga penganggaran di geser untuk kegiatan penunjang MPP, untuk Tahun 2023 diharapkan semua target yang ada di Renstra sudah dapat terpenuhi guna menunjang sasaran kenaikan investasi di Kota Malang.

f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Dengan tercapainya beberapa target indikator program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi maka pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang ketenagakerjaan dan Penanaman Modal pada Dinas Tenaga Kerja,

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nantinya bisa membantu memudahkan dalam memperoleh informasi baik secara langsung diakses masyarakat juga diharapkan bisa terintegrasi dengan OPD terkait sebagai pendukung sasaran yang ada di Renstra.

g. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Dengan tercapainya melebihi target program Pelayanan Penanaman Modal maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

h. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pada program ini baru tercapai beberapa target indikator program Pengendalian Penanaman Modal maka diharapkan pada semester 4 semua target dapat terpenuhi karena akan berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha yang ada di Kota Malang dan menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan tercapainya target program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berjalan dengan optimal, sehingga berpengaruh terhadap nilai SAKIP yang menjadi salah satu pendukung indikator sasaran yang ada pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2024 perlu dilakukan:

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja sesuai keahlian pada perusahaan-perusahaan sehingga dapat dipakai sebagai referensi dalam menentukan jenis-jenis pelatihan.
- b. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta usulan masyarakat dalam musrenbang;
- c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pembinaan bagi Bursa Kerja Khusus, Perusahaan pengerah jasa pekerja dan pencari kerja untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja dan *Job Market Fair* melalui media *online* sebagai solusi pada masa pandemi dalam pengelolaan Informasi Pasar Kerja serta job canvassing sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan pengusaha dalam pengentasan pengangguran;
- d. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pembinaan bagi pekerja dan pengusaha terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Syarat-Syarat Kerja, Pengupahan, kelembagaan ketenagakerjaan

- dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja guna membangun kondisi hubungan industrial yang harmonis;
- e. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kinerja ASN yang mendukung capaian program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - f. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan penyusunan *database* ketenagakerjaan, penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Merencanakan dan menganggarkan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan yang terintegrasi untuk menunjang kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - h. Merencanakan dan menganggarkan Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik (MPP) yang belum terakomodir di tahun 2023 secara bertahap sesuai kebutuhan;
 - i. Merencanakan dan menganggarkan regulasi peraturan dan kebijakan terkait Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja;
 - j. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan dengan teliti agar dapat mendukung capaian program pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Semua pejabat struktural atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengevaluasi kembali kegiatannya baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan apakah kegiatan tersebut keluarannya atau hasilnya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan memberikan manfaat. Sehingga dapat diusulkan kembali untuk renja tahun selanjutnya yang sifatnya berkesinambungan serta pada akhir rencana strategis lima tahunan target bisa terpenuhi dan tepat sasaran.
 - l. Semua pejabat struktural atau Pejabat Teknis Kegiatan harus melaksanakan program kegiatan yang telah diusulkan sesuai perencanaan sehingga program kegiatan dapat terealisasi sesuai target kinerja keluaran/hasil.
 - m. Melakukan penyesuaian dalam penganggaran tahun yang akan datang karena terdapat banyak penambahan kebutuhan sebagai konsekuensi pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 bisa dilihat pada tabel T-C.29.

G.II-13

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2.07	Bidang Urusan Tenaga Kerja									
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		100%	100.00%	100.00%	60.34%	100.00%	100.00%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%		100%	100.00%	100.00%	69.23%	100.00%	100.00%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renja/RKT	7 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	7 dokumen	13 dokumen	185.71%
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	33 dokumen	22 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100.00%	17 laporan	49 dokumen	148.48%

G.II-14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen standar pelayanan	12 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	2 laporan	12 dokumen	100.00%
		- Jumlah dokumen SKM	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%		4 dokumen	66.67%
		- Jumlah sertifikasi	5 sertifikasi	3 sertifikasi	1 sertifikasi	1 sertifikasi	100.00%		4 sertifikasi	80.00%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%		100%	100%	100.00%	42.11%	100.00%	100.00%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah ASN	206 orang	137 orang	66 orang	66 orang	100.00%	520 orang	723 orang	350.97%
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan keuangan	32 laporan	17 dokumen	5 laporan	5 laporan	100.00%	0 laporan	22 laporan	68.75%
		- Nilai Survey Kepuasan Internal	80		80	87.46	109.33%	83.25	87.46	109.33%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%		100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas/pakaian khusus	311 stel	142 stel	0 stel	0 stel	0.00%	0	142 stel	45.66%
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	331 orang	257 orang	66 orang	67 orang	101.52%	65 orang	389 orang	117.52%

G.II-15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	80%		80%	100.00%	125.00%	115.00%	100.00%	125.00%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44 jenis	29 jenis	5 jenis	5 jenis	100.00%	1 paket	35 jenis	79.55%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah alat tulis kantor	346 jenis	277 jenis	34 jenis	34 jenis	100.00%	4 paket	315 jenis	91.04%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan	123 jenis	83 jenis	11 jenis	11 jenis	100.00%	1 paket	95 jenis	77.24%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan	970 eks	370 eks	720 eks	720 eks	100.00%		1,090 eks	112.37%
		- Jumlah perundang-undangan	14 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	1 dokumen	11 dokumen	78.57%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah makanan dan minuman	21,069 kotak	9,228 kotak	5,183 kotak	5,540 kotak	106.89%	107 laporan	14,875 kotak	70.60%
		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	185 kali	121 kali	47 kali	50 kali	106.38%		171 kali	92.43%
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Jumlah bahan pustaka	20460 berkas	11,900 berkas	750 berkas	750 berkas	100.00%	0 dokumen	12,650 berkas	61.83%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%		100%	100.00%	100.00%	53.85%	100.00%	100.00%

G.II-16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon,air dan listrik	63 bulan	39 bulan	12 bulan	12 bulan	100.00%	12 laporan	63 bulan	100.00%
2.07.01.2.0.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Luasan ruangan yang dibersihkan	17,650 m2	4,700 m2	750 m2	750 m2	100.00%	2 laporan	5,452 m2	30.89%
		- Luasan ruangan yang dibersihkan		5,600 m2	5,600 m2	5,600 m2	100.00%		11,200 m2	
		- Jumlah bahan dan alat		26 jenis	17 jenis	17 jenis	100.00%		43 jenis	
		- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		80%	97.42 %	121.77%	0%	97.42%	121.77%
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	80%		80%	97.42 %	121.77%	25.00%	97.42%	121.77%
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	10 laporan	5 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00%	1 laporan	8 laporan	80.00%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%		100%	100.00%	100.00%	52.27%	100.00%	100.00%
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	30 jenis	12 jenis	35 jenis	28 jenis	80.00%	97 unit	137 jenis	456.67%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%		80%	39.02 %	48.78%	1.00%	39.02%	48.78%

G.II-17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	206 unit	126 unit	41 unit	41 unit	100.00%	21 unit	188 unit	91.26%
		- Jumlah volume BBM dan pelumas	52,984 liter	18,884 liter	20,160 liter	20,160 liter	100.00%		39,044 liter	73.69%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Rehabilitasi MPP	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100.00%	0 unit	2 paket	66.67%
		- Luasan gedung kantor yang dipelihara	1,877 m2	800 m2	0 m2	0 m2	0.00%		800 m2	42.62%
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	91 jenis	68 jenis	5 jenis	5 jenis	100.00%	215 unit	288 jenis	316.48%
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			99.80%		118.68%
					Predikat Kinerja			Sangat tinggi		Sangat tinggi
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	- Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1%	0%	1%	0.10%	10.11%	0.46%	0.56%	56.11%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	923 orang	165 orang	415 orang	415 orang	100.00%	103 orang	683 orang	74.00%

G.II-18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktivitas	393 orang	165 orang	136 orang	136 orang	100.00%	341 orang	642 orang	163.36%
		- Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	530 orang	327 orang	279 orang	279 orang	100.00%		606 orang	114.34%
		Persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja	70%		65%	100%	153.85%	27.79%	127.79%	182.56%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	35 LPKS	0 35.00	35 LPKS	35 LPKS	100.00%	35 Lembaga	35 LPKS	100.00%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	- Jumlah LPK yang mengikuti Bimtek	35 LPKS	0 LPKS	35 LPKS	35 LPKS	100.00%	40 LPKS	75 LPKS	214.29%
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%			163.99%
					Predikat Kinerja		Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	- Persentase pencari kerja yang ditempatkan	78%		77%	59.58%	77.38%	91.50%	151.08%	193.69%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK		33 BKK	34 BKK	103.03%	36 BKK	34 BKK	100.00%

G.II-19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	- Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	200 orang	250 orang	80 orang	80 orang	100.00%	90 orang	420 orang	210.00%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab/kota	976 lowongan		465 lowongan	595 lowongan	127.96%	0	595 lowongan	60.96%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	- Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair	275 perusahaan	60 perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	100.00%	0	95 perusahaan	34.55%
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	80 orang	orang	34 orang	34 orang	100.00%	0.00%	34 orang	42.50%
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	- Jumlah peserta sosialisasi perlindungan PMI dan PPTKIS	80 Orang	Orang	34 Orang	34 Orang	100.00%	0.00	34 Orang	42.50%
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)			100.00%		95.68%
					Predikat Kinerja			Sangat tinggi		Sangat tinggi
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	- Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	11.3%		10.18%	17.31%	170.09%	18.18%	35.49%	314.11%

G.II-20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	20%		10%	12.68 %	126.76%	0%	12.68%	63.38%
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	- jumlah peserta bimtek	200 orang	0 200.00	80 orang	80 orang	100.00%	0	80 orang	40.00%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	70.00 %		67%	50%	74.63%	46.67%	96.67%	138.10%
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah peserta pembinaan	250 orang	300 orang	80 orang	74 orang	92.50%	7 perkara	381 orang	152.40%

G.II-21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen hasil LKS Tripartit	21 dokumen	16 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	1 lembaga	19 dokumen	90.48%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							97.50%			94.29%
Predikat Kinerja							Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	- Persentase realisasi penanaman modal	80%		75%	50.52 %	67.36%	0%	50.52%	63.15%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	9 dokumen	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	- dokumen	6 dokumen	66.67%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Jumlah Ranperda / Ranperwal yang disusun	9 dokumen	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0.00%	0.00 dokumen	6 dokumen	66.67%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							0.00%			66.67%
Predikat Kinerja							Sangat Rendah			Sedang
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah minat investor	60%		50%	50%	100.00%	0%	50.00%	83.33%

G.II-22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	7 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100.00%	2 kali	6 kali	85.71%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah keikutsertaan dalam gelar pameran investasi	7 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100.00%	2 kali	6 kali	85.71%
		- Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	40 pelaku usaha		20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	100.00%		20 pelaku usaha	50.00%
		- Jumlah profil yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100.00%		1 dokumen	50.00%
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100.00%			61.90%
			Predikat Kinerja				Sangat tinggi			Rendah
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	- Persentase Penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum	90%		87.5%	86.73%	99.12%	77.40%	164.13%	182.37%
		- Persentase Penerbitan ijin dan non ijin Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	90%		87.5%	73.77%	84.30%	70.87%	144.64%	160.71%
		- Persentase realisasi target retribusi IMB	100%		100%	5.55%	5.55%	12%	17.33%	17.33%

G.II-23

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan pekerjaan umum sesuai standar	18,200 Izin	27102 Izin	5,000 Izin	6,581 Izin	131.62%	1,887 Izin	35,570 Izin	195.44%
		- Jumlah layanan perizinan dan nonperizinan Ekaonomi, pariwisata dan sosial budaya sesuai standar	15,200 Izin	11995 Izin	5,000 Izin	6,709 Izin	134.18%	3,764 Izin	22,468 Izin	147.82%
		- Persentase IMB yang terbit	80%	83.57%	75%	583 PBG		0.00%	83.57%	104.46%
		- Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%		100%	100%	100.00%	100.00%	100%	100.00%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah Perizinan nonperizinan pekerjaan umum yang diterbitkan	18200 izin	27,102 izin	5,000 izin	6,581 izin	131.62%	5,651 pelaku usaha	39,334 izin	216.12%
		- Jumlah perizinan dan Non Perizinan Ekparsosbud yang diterbitkan	15200 izin	11,995 izin	5,000 izin	6,709 izin	134.18%		18,704 izin	123.05%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	- Jumlah pengajuan ijin yang ditinjau	2310 berkas	0 berkas	1,100 berkas	470 berkas	42.73%	100 kegiatan usaha	570 berkas	24.68%

G.II-24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- jumlah pengaduan yang ditangani	100 pengaduan	0 pengaduan	50 pengaduan	64 pengaduan	128.00%	32 orang	96 pengaduan	96.00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							109.13%			114.96%
Predikat Kinerja							Sangat tinggi			Sangat tinggi
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketaatan pelaku usaha wajib LKPM	80%		75%	5.54%	7.39%	5.54%	11.08%	13.86%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	69 perusahaan	3 perusahaan	23 perusahaan	142 perusahaan	617.39%	19 perusahaan	164 perusahaan	237.68%
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Profil hasil pemantauan LKPM	75 proyek	25 75.00	0 proyek	0 proyek	0.00%	31 kegiatan usaha	56 proyek	74.67%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah peserta bimbingan teknis/ sosialisasi	2,048 orang	1,527 orang	245 orang	300 orang	122.45%	0 pelaku usaha	1,827 orang	89.21%

G.II-25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal	80 kali	43 kali	9 kali	12 kali	133.33%	19 kegiatan usaha	74 kali	92.50%
		- profil hasil pengawasan dan BAP	610 proyek	48 proyek	20 proyek	20 proyek	100.00%		68 proyek	11.15%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)							88.95%			66.88%
Predikat Kinerja							Tinggi			Sedang
		-								
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	- Persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat	100%		90%	31.01%	34.45%	30.00%	61.01%	61.01%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%		75%	100.00%	133.33%	20.32%	120.32%	150.40%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Jumlah data yang diolah	28,000 data	0 data	8,000 data	11,726 data	146.58%	2 dokumen	11,728 data	41.89%
		- Jumlah fitur	21 fitur	7 fitur	7 fitur	7 fitur	100.00%		14 fitur	66.67%

G.II-26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)						123.29%			54.28%
	Predikat Kinerja						Sangat tinggi			Sangat Rendah
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Keseluruhan						90.96%			93.04%
	Predikat Kinerja Keseluruhan						Tinggi			Sangat tinggi
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				:					
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				:					
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam tribulan berikutnya**)				:					
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya**)				:					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan.

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam proses evaluasi kinerja dengan tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu melaksanakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.

Pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah :

- a. Rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2022 terealisasi sebesar 11,92 dan pada tahun 2023 triwulan 2 terealisasi sebesar 9,14 dari target sebesar 73,00.
- b. Persentase peningkatan nilai investasi daerah terealisasi sebesar 4,87% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 triwulan 2 terealisasi sebesar -79,62% dari target sebesar 4,00%.
- c. Rasio penduduk yang bekerja terealisasi sebesar 92,34% pada tahun 2022 dan tahun 2023 triwulan 2 terealisasi 92,34% dari target 94,40%.
- d. Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik terealisasi sebesar 3,67 pada tahun 2022 dan tahun 2023 triwulan 2 dari target 4,50.
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan terealisasi sebesar 87,46 pada tahun 2022 dan sebesar 83,25 tahun 2023 triwulan 2 dari target sebesar 89,50.
- f. Nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 87,50 sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar 87,75 dari target sebesar 80,40.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Rasio daya serap tenaga kerja			70.00	73.00	-	-	11.92	9.14	-	-	
2.	Persentase peningkatan nilai investasi daerah		Ö	3.90%	4.00%	-	-	4.87%	-79.62%	-	-	
3.	Rasio penduduk yang bekerja			94.10%	94.40%	92.41%	92.45%	92.34%	92.34%	92.41%	92.45%	
4.	Indeks Layanan SPBE pada aspek pelayanan publik			3.80	4.50	3.67	4.00	3.67	3.67	3.75	3.95	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan			89.00	89.50	88.00	89.00	87.46	83.25	87.50	88.50	
6.	Nilai SAKIP			80.30	80.40	87.50	88.00	87.50	87.75	87.75	88.00	
7.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi dan terselesaikan			-	-	81.00%	83.00%	-	-	81.00%	83.00%	

2.3. Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan

Pelayanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk di telusuri perkembangannya mengingat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut mengakibatkan interaksi antara aparat daerah dan masyarakat menjadi lebih intens. Hal ini ditambah dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan pengakuan akan hak asasi manusia yang melahirkan tuntutan terhadap manajemen pelayanan yang berkualitas. Peran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam pelayanan publik mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Pelayanan perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi Daerah. Kewenangan untuk memungut retribusi serta penerbitan izin menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun untuk mencegah terjadinya pungutan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, maka penting dan perlunya pengembangan kinerja birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi. Tetapi upaya kearah tersebut masih banyak mengalami permasalahan serius. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang masih dihadapkan dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan. Tingkat kinerja pelayanan perizinan dapat dikatakan berhasil apabila semua jenis layanan dapat memuaskan masyarakat, dimana semua pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan, Standar Pelayanan serta berkomitmen terhadap SMM ISO dan Zona Integritas yang sudah ada pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

2. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Terus bertambahnya jumlah angkatan kerja, di satu sisi lapangan kerja yang tersedia tidak memadai menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.
- b. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berakibat rendahnya daya saing yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.
- c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan, perizinan, penanaman modal yang akurat, lengkap dan berkesinambungan serta mudah diakses oleh publik melalui sistem informasi/aplikasi.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional
 - a. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
 - b. Masih adanya anggapan masyarakat terhadap proses perizinan yang berbelit-belit.
 - c. Rendahnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan.
 - d. Pertumbuhan investasi di Kota Malang belum maksimal.
4. Tantangan dan Peluang Dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai wilayah perkotaan Kota Malang mempunyai peluang usaha yang besar dalam bidang pendidikan dan pariwisata, disisi lain dengan adanya arus global yang sangat besar masuk ke Indonesia berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Beberapa peluang yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

 - a. Pelayanan dengan menggunakan Teknologi Informasi yang dengan mudah diakses masyarakat dalam perizinan *online*.
 - b. Transparansi biaya dalam pengurusan perizinan.
 - c. Pelayanan perizinan keliling yang memudahkan masyarakat mengurus izin.
 - d. Adanya Mal Pelayanan Perizinan di tengah kota.
5. Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

 - a. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja disektor formal serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja;
 - b. Kesetaraan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelatihan kerja, informasi lowongan kerja dan wirausaha baru;
 - c. Fase transisi pencari kerja dari dunia pendidikan dan ke dunia kerja seiring perkembangan zaman yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi (digitalisasi dan otomatisasi);
 - d. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
 - e. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi angkatan kerja;
 - f. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja akibat perubahan berbagai peraturan;
 - g. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
 - h. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
 - i. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* berbasis resiko

sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

j. Iklim Investasi

Kota Malang sebagai Kota yang berkembang pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif, melalui :

1. Optimalisasi pemetaan potensi investasi
2. Optimalisasi promosi dan fasilitasi di bidang investasi
3. Optimalisasi Duta Investasi
4. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi
5. Optimalisasi data ketenagakerjaan, perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.

k. Kualitas Pelayanan Publik

Disnaker, PMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Untuk mewujudkan layanan yang berkualitas harus didukung dengan :

1. Peran serta masyarakat dalam menyusun Standar Pelayanan.
2. Tersedianya layanan pengaduan yang memadai.
3. Layanan OSS yang maksimal.
4. Layanan Mobil Keliling ke Kecamatan dan Kelurahan
5. Mal Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan publik bersama.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

1. Dari Rancangan Renja yang disusun Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dinas. Rencana kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran strategis, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai hasil analisis kebutuhan terhadap program kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Bidang Tenaga Kerja melaksanakan 4 (empat) program, Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal melaksanakan 2 (dua) program, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya dan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum melaksanakan 1 (satu) program, Bidang Pengendalian, Pengaduan, Data dan Informasi melaksanakan 2 (dua) program serta Sekretariat melaksanakan 1 (satu) program, dengan jumlah keseluruhan sub kegiatan sebanyak 53 sub kegiatan dan anggaran yang

dibutuhkan sebesar Rp. 21.890.977.293,00. (Dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

- a. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 3.726.120.000,00 menjadi Rp.1.391.180.000,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - b. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 304.375.000,00 menjadi Rp. 286.750.000,00 Pada Rancangan Akhir RKPD.
 - c. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Hubungan Industrial sebesar Rp.912.850.000,00 menjadi Rp. 616.600.000,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - d. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp.300.000.000,00 menjadi Rp. 180.000.000,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - e. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp.850.000.000,00 menjadi Rp. 550.000.000,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - f. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 1.357.543.309,00 menjadi Rp. 1.339.263.309,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - g. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengendalian Penanaman Modal sebesar Rp. 770.001.312,00 menjadi Rp. 714.626.312,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - h. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 417.038.214,00 menjadi Rp.417.038.214,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - i. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.562.538.895,00 menjadi Rp16.369.784.658,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
 - j. Hasil analisis kebutuhan untuk Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp.25.734.800,00 menjadi 25.734.800,00 pada Rancangan Akhir RKPD.
2. Dengan adanya analisis kebutuhan ini diharapkan mampu mencapai target kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dimana ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutin dan menunjang operasional pelayanan dinas.
 3. Dari Rancangan Akhir RKPD tidak ditemukan perbedaan untuk program, kegiatan dan subkegiatan dengan hasil analisis kebutuhan sehingga perlu pertimbangan penetapan pagu sesuai analisis kebutuhan.
 4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 disajikan dalam tabel T-C.31

G.II-33

Tabel T-C.31

REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21,890,977,293	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26,226,201,530	
	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				2,320,264,800	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA			4,969,079,800	
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	20.00%	25,734,800	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	20.00%	25,734,800	
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	25,734,800	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	25,734,800	
1.1.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Malang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 orang	25,734,800	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5 orang	25,734,800	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80.00%	1,391,180,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80.00%	3,726,120,000	

G.II-34

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi	60.00%	1,182,220,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi	60.00%	3,502,000,000	
2.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Malang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	242 Orang	1,181,570,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	242 Orang	3,500,000,000	
2.1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Malang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	650,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	2,000,000	
2.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100.00%	89,840,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100.00%	105,000,000	
2.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Malang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	35 Lembaga	89,840,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	35 Lembaga	105,000,000	

G.II-35

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	0.50%	39,490,000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	0.50%	39,490,000	
2.3.1	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Malang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	39,490,000	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	39,490,000	
2.4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	127742079	79,630,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	127,742,079	79,630,000	
2.4.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	79,630,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	79,630,000	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65.11%	286,750,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	65.11%	304,375,000	
3.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	36 BKK	227,235,000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	36 BKK	244,860,000	

G.II-37

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	20.00%	616,600,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	20.00%	912,850,000	
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	11.79%	101,830,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan	11.79%	250,000,000	
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Malang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	90 Perusahaan	50,640,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	90 Perusahaan	100,000,000	
4.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Malang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	90 Perusahaan	50,640,000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	90 Perusahaan	100,000,000	

G.II-38

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Malang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	550,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	50,000,000	
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	44.81%	514,770,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	44.81%	662,850,000	
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	50,640,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkara	100,000,000	

G.II-39

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Malang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	50,640,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	20 Perkara	100,000,000	
4.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Malang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50,640,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50,640,000	
4.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	312,210,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	312,210,000	
4.2.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Malang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 Orang	50,640,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 Orang	100,000,000	

G.II-40

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				19,570,712,493	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL			21,257,121,730	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100.00%	11,283,717,864	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	11,618,215,182	
5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100.00%	194,455,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	194,455,000	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,325,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7,325,000	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,380,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,380,000	

G.II-41

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,045,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,045,000	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,715,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,715,000	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,500,000	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,420,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4,420,000	

G.II-42

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	174,070,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	174,070,000	
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,089,262,864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%	11,423,760,182	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	65 Orang/ Bulan	11,065,252,864	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	65 Orang/ Bulan	11,302,278,182	
5.2.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan engujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	5,000,000	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan engujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	90,000,000	
5.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	19,010,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	31,482,000	
			Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	276,279,600	0	Persentase pelaporan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	2,881,006,689	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	276,279,600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	276,279,600	

G.II-43

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Malang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	67,690,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66 Paket	67,690,000	
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Malang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	208,589,600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	208,589,600	
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	973,556,229	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100%	1,122,190,164	Penunjang sarana MPP
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,056,210	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,056,210	
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Malang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	191,370,885	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	277,543,770	
5.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Malang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	167,651,850	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	199,812,900	Rehabilitasi tahap 3 MPP
5.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	28,290,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	58,590,000	

G.II-44

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	406,647,284	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	406,647,284	
5.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	87,540,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	87,540,000	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	1,115,479,965	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	1,482,536,925	
5.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	527,782,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	894,839,760	
5.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	587,697,165	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	587,697,165	
	0	0	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	2,720,751,000	0	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	3,063,317,024	
5.6	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	53,990,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100%	63,275,000	

G.II-45

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.6.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	53,990,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	63,275,000	
5.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	552,375,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100%	552,375,000	
5.8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	552,375,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	552,375,000	
5.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	2,114,386,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	2,447,667,024	
5.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	597,080,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	919,273,024	
5.8.2	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	1,435,290,000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	1,435,290,000	

G.II-46

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230 Unit	82,016,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230 Unit	93,104,000	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	80.00%	180,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Regulasi atas kemudahan investasi yang tersusun	80.00%	300,000,000	
6.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	125,000,000	
6.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	5,000,000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	125,000,000	
6.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	1 Dokumen	175,000,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	1 Dokumen	175,000,000	

G.II-47

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175,000,000	
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	Jumlah minat investor	2 Investor	550,000,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investor	2 Investor	850,000,000	
7.1	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	0	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 Kegiatan	550,000,000	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 Kegiatan	850,000,000	
7.1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Malang	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	50,000,000	
7.1.2	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Kota Malang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	500,000,000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	800,000,000	
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum	85.00%	958,728,255	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum	85.00%	1,307,543,309	

G.II-48

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	85.00%	352,635,054		Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya	85.00%		-
			Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	27,900,000		Persentase pengaduan yang diselesaikan	100%	50,000,000	
8.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	4000 izin	958,728,255	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum Sesuai Standar	4000 izin	1,307,543,309	
			Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar	5000 izin	352,635,054		Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Sesuai Standar	5000 izin		-
			Jumlah pengaduan yang diselesaikan	50 pengaduan	27,900,000		Jumlah pengaduan yang diselesaikan	50 pengaduan	50,000,000	

G.II-50

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		0 Persentase kepatuhan pelaku usaha wajib LKPM	80.00%	714,626,312	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha wajib LKPM	80.00%	770,001,312	
9.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0 Jumlah Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	25 Perusaha an	714,626,312	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN	25 Perusaha an	770,001,312	
9.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Malang	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	1,325,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 Kegiatan Usaha	2,500,000	
9.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kota Malang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	442 Pelaku Usaha	617,501,312	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	442 Pelaku Usaha	617,501,312	

G.II-51

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Kota Malang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	95,800,000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha	150,000,000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang terupdate	100.00%	417,038,214	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang terupdate	100.00%	417,038,214	
			Persentase sistem informasi layanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	70.00%	-		Persentase sistem informasi layanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi	70.00%		
10.1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80.00%	417,038,214	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	80%	417,038,214	

G.II-52

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Malang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	417,038,214	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen	417,038,214	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengakomodir usulan kegiatan dari musrenbang kelurahan/kecamatan, musrenbang tematik, usulan FPD dari stakeholder serta usulan Pokir terkait urusan ketenagakerjaan dan penanaman modal sebagaimana telah diusulkan pada kamus usulan tahun 2024. Usulan tersebut akan diakomodir pada 3 sub kegiatan yaitu Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Usulan kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap isu-isu strategis dalam penyelenggaraan bidang Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga menjawab permasalahan yang selama ini menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui usulan kegiatan pada RKPD Kota Malang tahun 2024.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam rancangan akhir RKPD tahun 2024 disajikan dalam tabel T-C.32. :

G.II-54

T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Malang

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
1	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. Raya Kepuh no 30 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Sekretariat Karang Taruna Jl puntodewo 29 RT.001 RW.003, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No 121, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Balai RW 01, Jl. S.Supriyadi RT 02 RW 01, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. Budi Utomo No.1, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. H. Ali Nasrudin RW 2, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Karang Taruna Kelurahan, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan

G.II-55

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pelatihan Administrasi Perkantoran		RT.05 Gg.IV RW.01 Tlogomas, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. hasyim ashari No 21, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
10	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. Ki ageng Gribig No.1 Rt.7 Rw.3, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
11	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl.Gajayana No.28 b, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
12	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. Gajayana 28 B, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
13	Pelatihan Administrasi Perkantoran		Jl. Mayjend Pandjaitan No. 22B, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
Jumlah Pelatihan Administrasi Perkantoran					18	Orang		81.000.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							

G.II-56

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. MGR. Sugio Pranoto No. 23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Malang, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. A. I. Suryani II, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		RW03 DAN RW06, Kota Malang		2	Orang	5.000.000	10.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Sekretariat Karang Taruna Jl puntodewo 29 RT.001 RW.003, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl Bantaran Barat II no.2 Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Budi Utomo No.1, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Ki Ageng Gribig No. 12, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
10	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Bandara Narita RW. 11, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
11	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Kel. Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang		2	Orang	5.000.000	10.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
12	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Letjen S Parman RW 23, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan

G.II-57

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		JL MT Haryono XIII/413, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
14	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Warga RW.01 dan PKK Tlogomas, Kota Malang		2	Orang	5.000.000	10.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
15	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. hasyim ashari No 21, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
16	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Ki ageng Gribig No.1 Rt.7 Rw.3, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
17	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jalan Sriwijaya no 1, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
18	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Mergan Sekolahan nomor 38B, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
19	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		Jl. Gajayana 28 B, Kota Malang		1	Orang	5.000.000	5.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
Jumlah Pelatihan Tata Kecantikan Rambut					22	Orang		110.000.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							

G.II-58

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
1	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl. MGR. Sugio Pranoto No. 23A Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Malang, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		RW06, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
3	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		RW01 Kelurahan Arjosari, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
4	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Sekretariat Karang Taruna Jl puntodewo 29 RT.001 RW.003, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
5	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No 121, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
6	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl. Budi Utomo No. 1, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl. H. Ali Nasrudin RW 2, Kota Malang		1	Orang	4.500.000	4.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
8	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
9	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Karamg Taruana Kel. Gadang, Jl. Kol. Sugiono 190, Kel Gadang Kec. Sukun, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
10	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Kel. Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang		3	Orang	4.500.000	13.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan

G.II-59

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Kantor Kelurahan Sukoharjo - Jalan Aris Munandar 54 RW 01, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
12	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl.Gajayana No.28 b, Kota Malang		2	Orang	4.500.000	9.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
13	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Jl. Gajayana 28 B, Kota Malang		3	Orang	4.500.000	13.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
Jumlah Pelatihan Teknisi Telepon Seluler					24			108.000.000	
Jumlah Pelatihan					64			299.000.000	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							
1	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Karang Taruna, Jl. Puncak Buring Indah 1 Kelurahan Buring, Kota Malang		10	Orang	700.000	7.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Sekertariat Karang Taruna Jl puntodewo 29 RT.001 RW.003, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
3	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No 121, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan

G.II-60

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. H. Ali Nasrudin RW 2, Kota Malang		1	Orang	700.000	700.000	Usulan musrenbang Kelurahan
5	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. Raya Cemorokandang No. 1, Kota Malang		8	Orang	700.000	5.600.000	Usulan musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kel. Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang		15	Orang	700.000	10.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Kantor Kelurahan Sukoharjo - Jalan Aris Munandar 54 RW 01, Kota Malang		38	Orang	700.000	26.600.000	Usulan musrenbang Kelurahan
8	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. Ki ageng Gribig No.1 Rt.7 Rw.3, Kota Malang		9	Orang	700.000	6.300.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
9	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. Ketapang 02, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
10	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jalan Ciliwung I Blok 54, Kota Malang		9	Orang	700.000	6.300.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda

G.II-61

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl.Gajayana No.28 b, Kota Malang		2	Orang	700.000	1.400.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
12	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. Mergan Sekolahan nomor 38B, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
13	Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jl. Mayjend Pandjaitan No. 22B, Kota Malang		9	Orang	700.000	6.300.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
Jumlah Sosialisasi Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					121	Orang		84.700.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
1	Sosialisasi perizinan usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	RW01 dan RT05 RW03 Kelurahan Arjosari , Kota Malang		12	Orang	700.000	8.400.000	Usulan musrenbang Kelurahan
2	Sosialisasi perizinan usaha		Kelurahan Samaan Jl. Kaliurang Barat No 121, Kota Malang		25	Orang	700.000	17.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
3	Sosialisasi perizinan usaha		Jl Bantaran Barat II No. 2 Kelurahan Tulusrejo, Kota Malang		20	Orang	700.000	14.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
4	Sosialisasi perizinan usaha		Aula Jl. Terusan Cikampek 147, Kota Malang		20	Orang	700.000	14.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan

G.II-62

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. H. Ali Nasrudin RW 2, Kota Malang		1	Orang	700.000	700.000	Usulan musrenbang Kelurahan
6	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Bandara Narita RW. 11, Kota Malang		10	Orang	700.000	7.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
7	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Kol. Sugiono 190, Kel Gadang Kec. Sukun, Kota Malang		20	Orang	700.000	14.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
8	Sosialisasi perizinan usaha		Kelompok Usaha Bersama RW. 06, Jl. Gadang VI RW. 06, Kota Malang		15	Orang	700.000	10.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
9	Sosialisasi perizinan usaha		Kel. Blimbing, Jl. Tenaga Utara No. 01, Kota Malang		40	Orang	700.000	28.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
10	Sosialisasi perizinan usaha		Kantor Kelurahan Kotalama, Jl. Kebalen Wetan No.5, Kota Malang		50	Orang	700.000	35.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
11	Sosialisasi perizinan usaha		Kantor Kelurahan Sukoharjo - Jalan Aris Munandar 54 RW 01, Kota Malang		20	Orang	700.000	14.000.000	Usulan musrenbang Kelurahan
12	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Letjen S Parman RW 23, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Kelurahan
13	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Kawi 24C, Kota Malang		30	Orang	700.000	21.000.000	Usulan musrenbang tematik
14	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Ki ageng Gribig No.1 Rt.7 Rw.3, Kota Malang		10	Orang	700.000	7.000.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
15	Sosialisasi perizinan usaha		Jl.Gajayana No.28 b, Kota Malang		2	Orang	700.000	1.400.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda

G.II-63

No.	Nama Paket/Usulan	Program/Kegiatan/Uraian (nama sub kegiatan dalam SIPD)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume				Catatan
					Volume	Satuan	Harga Perkiraan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Sumba No 12, Kota Malang		5	Orang	700.000	3.500.000	Usulan musrenbang Tematik Pemuda
17	Sosialisasi perizinan usaha		Jl. Sulfat no.12 kota malang, Kota Malang		57	Orang	700.000	39.900.000	Usulan musrenbang Tematik Lansia
	Jumlah Sosialisasi perizinan usaha				342	Orang		239.400.000	
	Jumlah Usulan Murenbang Kelurahan dan Tematik				672	Orang		623.100.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
1	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. MT.Haryono X Kelurahan Dinoyo, Kota Malang		12	Orang	5.000.000	60.000.000	Pokok pikiran
2	Pelatihan Tata Kecantikan Rambut		KECAMATAN LOWOKWARU, Kota Malang		25	Orang	5.000.000	125.000.000	Pokok pikiran
3	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler		Karang taruna RW.08 Jl. Palmerah Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang		4	Orang	4.500.000	18.000.000	Pokok pikiran
	Jumlah Pokir				41	Orang		203.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJMN antara Lain :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa, pelayanan barang dan/atau pelayanan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan SPM; dan
- b. Menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui 16 paket Kebijakan Ekonomi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan dan Sasaran Kota Malang untuk periode 2024-2026 yaitu pada tujuan 1 (satu) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan tujuan 4 (empat) Terwujudnya Transformasi Pelayanan Publik yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah:

a. Tujuan

- Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Masyarakat
Indikator : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal
Indikator : Nilai Investasi Daerah.

b. Sasaran

Pada tujuan 1 mempunyai 2 (dua) sasaran yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja
Indikator : Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan.
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Hubungan Industrial yang kondusif.
Indikator : Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang terfasilitasi dan terselesaikan

Sedangkan pada tujuan 2 mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu :

- Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Indikator : Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik
Indikator : Indeks Domain Layanan SPBE pada aspek layanan publik berbasis elektronik.
- Sasaran 5 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.
Indikator : Nilai SAKIP.

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun

2021. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. Pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
- d. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- e. Pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. Pemberian konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- g. Pengukuran produktivitas tenaga kerja;
- h. Pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
- i. Koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
- j. Koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
- k. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;
- l. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;
- m. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- n. Penyusunan peta potensi investasi;
- o. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- p. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
- q. Pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- r. Pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
- s. Pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
- t. Pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- u. Pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
- v. Pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
- w. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- x. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- y. Pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- z. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- aa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Upaya pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kota Malang merupakan bagian penting dalam pembangunan di Kota Malang. Untuk menghadapi keterbukaan pasar global, menuntut peningkatan produktivitas tenaga kerja dan

peningkatan keahlian/kompetensi tenaga kerja berfungsi dengan sempurna dalam melakukan transaksi ketenagakerjaan. Dengan peningkatan kompetensi yang memadai, diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dalam dunia kerja, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kota Malang. Disamping itu, upaya menciptakan hubungan industrial yang kondusif mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pekerja dan pengusaha memperoleh hak dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Pembangunan ketenagakerjaan yang komprehensif dan berkelanjutan di daerah membutuhkan sebuah perencanaan ketenagakerjaan sebagai informasi ketenagakerjaan dan upaya pembangunan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Sedangkan ruang lingkup Penanaman Modal dan PTSP mencakup pelayanan untuk semua jenis perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal melalui :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pelayanan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang operasional pelayanan dan fasilitas pelayanan.
3. Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal, terlaksananya koordinasi yang baik antar lembaga atau instansi dalam pengendalian pelaksanaan investasi dan perizinan.
4. Layanan Pengelolaan Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP.
5. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal didukung *Online Single Submission (OSS)*. Pelaksanaan OSS mempunyai manfaat :
 - a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
 - b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
 - c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
 - d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
6. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
 Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal berbasis elektronik meliputi : potensi dan peluang penanaman modal, jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan.

Menata kebijakan administrasi perizinan guna mendorong terakomodasinya hak-hak masyarakat dan meningkatkan kualitas dokumen, data dan informasi sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Koordinasi dengan dinas terkait dalam penerapan peraturan perundang – undangan maupun perda yang mendukung administrasi dan teknis perizinan;
2. Penyempurnaan sistem permohonan izin dan pengelolaan informasi perizinan melalui sistem administrasi komputerisasi berbasis *Online*;

3. Penataan kelembagaan administrasi Investasi dan Perizinan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Penanaman Modal/Investasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.

3.2. Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Yang menjadi salah satu bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah sasaran dalam pencapaian visi dan misi Walikota Malang. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Malang, maka sebelum melaksanakan perumusan atas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dirasakan perlu untuk memahami makna tujuan sasaran yang diinginkan. Transparansi pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah harus dilaksanakan. Salah satu implikasi dari tekad ini adalah kewajiban bagi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang untuk menjawab tantangan tersebut agar lebih transparan dalam setiap pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Harus diakui bahwa masyarakat menuntut agar pelayanan publik dapat ditingkatkan dan lebih transparan, sehingga Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang harus bekerja dengan lebih baik, lebih terbuka dan secara internal dapat membina aparatnya kearah yang lebih profesional, responsif, akuntabel, transparan dan demokratis. Tuntutan ini membawa implikasi yang sangat luas dalam memacu pengembangan karier aparat dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan keterbukaan dimana setiap Instansi Pemerintah Kota Malang dituntut mampu untuk melihat kebutuhan, potensi ekonomi daerah dan peluang dalam rangka mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan yang bersifat lokal dan regional. Hubungan yang semakin terbuka antara masyarakat dengan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini selain mempunyai peluang juga mengandung tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan hasil pertimbangan terhadap tujuan sasaran dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang menetapkan beberapa Program dan Kegiatan.

- b. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, maka perlu ditetapkan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. Kegiatan yang sedang berjalan yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra serta program dan kegiatan alternatif merupakan program dan kegiatan yang perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Malang dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 ada 10 (sepuluh) program yaitu :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
6. Program Promosi Penanaman Modal;
7. Program Pelayanan Penanaman Modal;
8. Program Pengendalian Penanaman Modal;
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2024 terdapat 22 (Dua puluh dua) kegiatan dan 53 (Lima puluh tiga) sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Untuk penganggaran program dan kegiatan berasal dari 4 (empat) sumber yaitu APBD/PAD Kota Malang, DAK, DBHCHT dan Pokir dengan pagu indikatif sebesar Rp. 21.890.977.293,00. (Dua puluh satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk anggaran yang bersumber dari APBD/PAD Kota Malang adalah :
 - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp. 25.734.800,00
 - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp.1.391.180.000,00.
 - c) Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp. 288.570.000,00.
 - d) Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 616.600.000,00.
 - e) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp.180.000.000,00.
 - f) Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 550.000.000,00.
 - g) Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 1.339.263.309,00.
 - h) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp.714.626.312,00.
 - i) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 417.038.214,00.
 - j) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16.369.784.658,00.
2. Anggaran yang bersumber dari DBHCHT dan DAK Tahun 2024 menunggu alokasi dari TAPD.

c. Rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Terdapat satu program, kegiatan dan subkegiatan yang belum direncanakan pada ranwal Renja namun sesuai kebutuhan dan untuk pemenuhan capaian IKK urusan tenaga kerja maka ditambahkan satu subkegiatan pada rankhir Renja yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja, Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dan Subkegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

Adapun dampak dari adanya pemutakhiran SIPD, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami perubahan baik perubahan nomenklatur, indikator kinerja maupun kode subkegiatan. Pada urusan tenaga kerja terdapat 1 subkegiatan yang mengalami perubahan kode subkegiatan, nomenklatur dan indikator kinerja yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro berubah menjadi Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dan indikator kinerja menjadi jumlah SDM perusahaan yang mampu menyusun RTK mikro.

Sedangkan pada urusan penanaman modal terdapat 8 subkegiatan yang mengalami perubahan kode subkegiatan, nomenklatur dan indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota dan indikator menjadi Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota
- b. Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berubah nomenklatur menjadi Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dan indikator kinerja menjadi Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- c. Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko, dan indikator kinerja menjadi Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berubah nomenklatur menjadi Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko, dan indikator kinerja menjadi Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.
- e. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya, dan indikator menjadi Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
- f. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, dan indikator menjadi Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- g. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berubah nomenklatur menjadi Pengawasan Penanaman Modal, dan indikator menjadi Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.
- h. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berubah nomenklatur menjadi Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan indikator kinerja menjadi Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

G.IV-1
BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang akan menjelaskan tentang program, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2024 yang akan tersaji dalam rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 sesuai tabel T.C – 33 sebagai berikut :

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%			100 %	89.840.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	110.000.000,00		
2	07	03	2.02	000 1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35 Lembaga			35 Lembaga	89.840.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	35 Lembaga	110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	1,9%			0,5 %	39.490.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Perusahaan kecil	0,7%	39.000.000,00		
2	07	03	2.04	000 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	60 Perusahaan			20 Perusahaan	39.490.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Perusahaan kecil	20 Perusahaan	39.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	127.997.690 -			127.742.079 -	79.630.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Tenaga kerja	127.869.821 -	87.000.000,00		
2	07	03	2.05	000 1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	79.630.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera	Tenaga kerja	1 Dokumen	87.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	71,79%			65,11 %	286.750.000,00							68,37%	181.350.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	37BKK			36 BKK	227.235.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pencari Kerja, BKK	36BKK	170.350.000,00	
2	07	04	2.01	000 2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	105 Orang			25 Orang	61.150.000,00	Kota Malang, Keungkidang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pencari Kerja, BKK	35 Orang	66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	04	2.01	000 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	436 Orang			206 Orang	147.710.000,00	Kota Malang, Keungkidang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pencari Kerja, BKK	110 Orang	66.550.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	04	2.01	000 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	63 Orang			20 Orang	18.375.000,00	Kota Malang, Keungkidang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pencari Kerja, BKK	21 Orang	37.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	240Orang			75 Orang	59.515.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	CPMI/PMI, PPTKIS/P3MI	80Orang	11.000.000,00	
2	07	04	2.04	000 1	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang			75 Orang	59.515.000,00	Kota Malang, Keungkidang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	CPMI/PMI, PPTKIS/P3MI	80 Orang	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	40%			20 %	616.600.000,00						30%	1.200.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional					Daerah	
1			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	54 Perkara			20 Perkara	50.640.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pekerja, Pengusaha, Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha	18 Perkara	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	07	05	2.02	000	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi											
							4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.640.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pekerja, Pengusaha, Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha	4 Asosiasi dan Serikat Pekerja	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	07	05	2.02	000	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
							1 Lembaga	312.210.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pekerja, Pengusaha, Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha	1 Lembaga	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	07	05	2.02	000	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja											
							80 Orang	50.640.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Pekerja, Pengusaha, Asosiasi Pekerja dan Asosiasi Pengusaha	150 Orang	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							19.570.712.493,00		19.882.662.784,00		
5	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							16.369.784.658,00		16.884.903.784,00		
							100% 100% 100% 100%							100% 100% 100% 100%			
2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%				Memperkuat Stabilitas Politikhankeam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PPT - Peningkatan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Pegawai dan Penerima Layanan Danaker/PMP7SP	100%	224.144.000,00	
2	18	01	2.01	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen			7 Dokumen	7.325.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	11 Dokumen	8.790.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.380.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	1 Dokumen	1.656.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	2.045.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	2 Dokumen	2.454.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	1.715.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	1 Dokumen	2.058.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterlibatan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	2 Dokumen	4.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktikum Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan			6 Laporan	4.420.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	6 Laporan	5.304.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			4 Laporan	174.070.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPTSP	4 Laporan	199.682.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100%			100 %	11.089.262.864,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai DianakerPMPTSP	100%	12.566.136.199,00	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan			65 Orang/bulan	11.065.252.864,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai DianakerPMPTSP	65 Orang/bulan	12.432.505.999,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen			30 Dokumen	5.000.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai DianakerPMPTSP	30 Dokumen	99.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan			5 Laporan	19.010.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketertarikan, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai DianakerPMPTSP	5 Laporan	34.630.200,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1																			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen				2 Dokumen	87.540.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	2 Dokumen	59.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMMD	100%			100 %	552.375.000,00				Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	BMD PD, Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	100%	275.732.000,00	
2	18	01	2.07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit			11 Unit	552.375.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	BMD PD, Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	8 Unit	275.732.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%			100 %	1.115.479.965,00				Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	100%	1.477.972.271,00	
2	18	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan			36 Laporan	527.782.800,00	Kota Malang, Klojen, Kiduldalam Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	36 Laporan	894.839.760,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan			2 Laporan	587.697.165,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Keterbiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pegawai dan Penerima Layanan DianakerPMPSTSP	2 Laporan	583.132.511,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah					
1	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	2Dokumen			1 Dokumen	175.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Investor	1Dokumen	0,00		
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	175.000.000,00	Kota Malang, Kedungkandang, Arjo Winangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Investor	0 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
7	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah minat investor	7Investor			2 Investor	550.000.000,00						2Investor	800.000.000,00		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	15kegiatan			5 kegiatan	550.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Investor	5kegiatan	800.000.000,00		
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	15 Dokumen			3 Dokumen	500.000.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Investor	5 Dokumen	800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPI - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif	Investor	0 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
8	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan ijin dan non ijin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya Persentase penerbitan ijin dan non ijin Pekerjaan Umum Persentase pengaduan yang diselesaikan	85% 85% 80%			85 % 85 % 80 %	1.339.263.309,00							85% 85% 80%	1.445.009.000,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Praktik Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	90 Kegiatan Usaha.			20 Kegiatan Usaha.	1.325.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterbacaan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pelaku usaha	30 Kegiatan Usaha.	2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	852 Pelaku Usaha			442 Pelaku Usaha	617.501.312,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterbacaan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pelaku usaha	200 Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01	000	Pengawasan Penanaman Modal														
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku. Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha			30 Kegiatan Usaha	95.800.000,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketenraman, Keterbacaan Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pelaku usaha	40 Kegiatan Usaha	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
10	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terupdate	100% 100%		100 % 70 %	417.038.214,00						100% 80%	210.000.000,00		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang tersedia	85%		80 %	417.038.214,00			-	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pelaku usaha, Instansi terkait	83%	210.000.000,00		
2	18	06	2.01	000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Dimanfaatkan	24 Dokumen			10 Dokumen	417.038.214,00	Kota Malang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah	Pelaku usaha, Instansi terkait	6 Dokumen	210.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
J U M L A H										21.890.977.293,00							22.855.012.784,00		

G.IV-16

Tabel 4.2

PEMETAAN SUB KEGIATAN SESUAI PEMUTAKHIRAN

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				2.7.2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
	2.7.2.201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				2.7.2.201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
	2.7.2.201.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1	Perusahaan	2.7.2.201.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	5	Orang
2.	2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
	2.7.3.201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.7.3.201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
	2.7.3.201.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	242	Orang	2.7.3.201.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	242	Orang

G.IV-17

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.7.3.201.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3	Lembaga	2.7.3.201.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3	Lembaga
	2.7.3.202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				2.7.3.202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
	2.7.3.202.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35	Lembaga	2.7.3.202.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	35	Lembaga
	2.7.3.204	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				2.7.3.204	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
	2.7.3.204.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan	2.7.3.204.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	Perusahaan
	2.7.3.205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.7.3.205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

G.IV-18

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.7.3.205.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen	2.7.3.205.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen
3.	2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	2.7.4.201	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				2.7.4.201	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
	2.7.4.201.2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Orang	2.7.4.201.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Orang
	2.7.4.201.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	206	Orang	2.7.4.201.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	206	Orang
	2.7.4.201.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	Orang	2.7.4.201.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	Orang
	2.7.4.204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				2.7.4.204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			

G.IV-19

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.7.4.204.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75	Orang	2.7.4.204.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	75	Orang
4.	2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	2.7.5.201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.7.5.201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	2.7.5.201.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	90	Perusahaan	2.7.5.201.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	90	Perusahaan
	2.7.5.201.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	90	Perusahaan	2.7.5.201.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	90	Perusahaan

G.IV-20

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.7.5.201.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	2.7.5.201.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan
	2.7.5.202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				2.7.5.202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	2.7.5.202.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	Perkara	2.7.5.202.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20	Perkara

G.IV-21

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.7.5.202.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	Perkara	2.7.5.202.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20	Perkara
	2.7.5.202.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4	Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.7.5.202.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4	Asosiasi dan Serikat Pekerja
	2.7.5.202.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga	2.7.5.202.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga
	2.7.5.202.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80	Orang	2.7.5.202.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80	Orang

G.IV-22

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	2.18.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.18.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	2.18.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	2.18.1.201.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen
	2.18.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.18.1.201.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen
	2.18.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.18.1.201.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen
	2.18.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.18.1.201.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen

G.IV-23

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.1.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.18.1.201.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen
	2.18.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	2.18.1.201.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan
	2.18.1.201.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2.18.1.201.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan
	2.18.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.18.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	2.18.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan	2.18.1.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Orang/bulan
	2.18.1.202.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30	Dokumen	2.18.1.202.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30	Dokumen

G.IV-24

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	2.18.1.202.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan
	2.18.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.18.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	2.18.1.203.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2.18.1.203.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan
	2.18.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.18.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	2.18.1.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66	Paket	2.18.1.205.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66	Paket
	2.18.1.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	Orang	2.18.1.205.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	Orang
	2.18.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.18.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

G.IV-25

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.18.1.206.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket
	2.18.1.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.18.1.206.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket
	2.18.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2.18.1.206.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket
	2.18.1.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.18.1.206.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen
	2.18.1.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	2.18.1.206.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan
	2.18.1.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	2.18.1.206.001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen
	2.18.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.18.1.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

G.IV-26

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.1.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	Unit	2.18.1.207.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	Unit
	2.18.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.18.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	2.18.1.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	2.18.1.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan
	2.18.1.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	2.18.1.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan
	2.18.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.18.1.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	2.18.1.209.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit	2.18.1.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	Unit

G.IV-27

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.1.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2.18.1.209.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit
	2.18.1.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230	Unit	2.18.1.209.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230	Unit
6.	2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
	2.18.2.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.2.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.2.201.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	2.18.2.201.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen
	2.18.2.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2.18.2.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			

G.IV-28

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.2.202.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.18.2.202.000 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen
7.	2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
	2.18.3.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.3.201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.3.201.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	2.18.3.201.000 3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen
	2.18.3.201.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen	2.18.3.201.000 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	Dokumen
8.	2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			

G.IV-29

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.4.201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				2.18.4.201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	2.18.4.201.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8000	Pelaku Usaha	2.18.4.201.000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8000	Pelaku Usaha
	2.18.4.201.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	4	Kegiatan Usaha	2.18.4.201.000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4	Kegiatan Usaha

G.IV-30

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.4.201.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50	Orang	2.18.4.201.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	Pelaku Usaha
9.	2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
	2.18.5.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.18.5.201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.5.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20	Kegiatan Usaha.	2.18.5.201.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20	Kegiatan Usaha.

G.IV-31

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.5.201.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	442	Pelaku Usaha	2.18.5.201.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	442	Pelaku Usaha
	2.18.5.201.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30	Kegiatan Usaha	2.18.5.201.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30	Kegiatan Usaha
10.	2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			

G.IV-32

No.	Sesuai Renstra					Sesuai Pemutakhiran				
	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	2.18.6.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.18.6.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	2.18.6.201.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	Dokumen	2.18.6.201.000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10	Dokumen

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2024-2026 dalam menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kaidah-kaidah pelaksanaan yang wajib dipedomani oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yaitu:

1. Bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, agar segera menyusun rencana kerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja tahun 2024 secara murni dan konsekuen.
4. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berkewajiban menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas pembangunan Kota Malang.

Pada akhirnya seluruh kelengkapan dokumen yang termuat dalam Renja tahun 2024 ini selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, juga diharapkan dapatnya digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang untuk mengambil keputusan.